

**KONTRAK PELAYANAN ANTARA SEKTOR SWASTA DAN
PEMERINTAH DARI PERSAINGAN UNTUK KEMITRAAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG**

**(SERVICE CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT AND PRIVATE
SECTOR PARTNERSHIP OF COMPETITION FOR THE DISTRICT
GOVERNMENT SORONG)**

Oleh : Benyamin Mobalen

NIM. 170720130015

Prodi : Administrasi publik

Abstrak

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengesahkan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pemerintah kabupaten sorong memberikan jaminan bahwa proyek kerjasama pemerintah swasta prioritas yang dibangun oleh pihak swasta akan dijamin cukup untuk mengembalikan nilai investasinya yang disebut juga sebagai resiko pengembalian atas investasi.

Pada tahun 2011, nilai produk domestik regional bruto kabupaten sorong atas dasar harga berlaku yang tercipta mencapai 6,84 triliun rupiah dengan indeks perkembangan dari tahun 2008 sebesar 145,1. Setelah sub sektor pertambangan migas dan sub sektor industri migas dieliminir, terlihat kondisi yang berbeda pada sumbangan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto tanpa migas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Abstract

Economic development is a series of efforts and policies aimed at improving living standards, expanding employment, equalize the distribution of income communities, improve regional economic relations and endorsed the shift of economic activity from the primary sector to the secondary and tertiary sectors. Sliding district governments provide assurance that the public private partnership project priorities established by the private sector will be secured enough to return the value of the investment which is also known as return on investment risk.

In 2011, the county's gross regional domestic product at current prices slide which reached 6.84 trillion dollars created by the development of the 2008 index of 145.1. After the mining sub-sector and sub-sector oil and gas industry dieliminir, looks different conditions on pertambangan and quarrying sector donations and the manufacturing sector to the gross regional domestic product without oil. This research uses descriptive qualitative method

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar penentu strategi dan kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah

dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat maka perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka PDRB dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Adanya hubungan antara manusia tersebut kemudian melahirkan istilah kemitraan. Dalam rancangan strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor swasta didalam mengimplementasikan kebijakan publik didalam berbagai bidang, dalam bidang ekonomi khususnya. Ada lima kerjasama antar pemerintah dengan swasta antara lain; kerjasama bagi hasil usaha, kerjasama antara produksi, kerjasama manajemen, kerjasama bagi tempat usaha, dan kerjasama bagi keuntungan.

Dalam kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sudah tentu ada persaingan untuk meningkatkan kinerja ekonomi sebuah negara, membuka peluang usaha bagi warga negaranya dan mengurangi biaya barang dan jasa di seluruh bidang perekonomian. Akan tetapi, banyak peraturan perundang – undangan tersebut yang mengatur lebih jauh dari yang diperlukan untuk mencapai sasaran kebijakannya. Pemerintah dapat mengurangi pembatasan - pembatasan yang tidak perlu dengan menerapkan “ Toolkit penilaian persaingan usaha” yang baru dari OECD. Subtansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat

sebagaimana yang telah dikemukakan (rasyid,1996:O) bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri apalagi dilayani, tetapi dibentuk untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemampuan bersama,dengan demikian pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

III. .Kerangka konsep dan teori

3.1 Defenisi Pemerintah dan Swasta

Proyek KPS digagas untuk mengundang lebih banyak peran dan inisiatif swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara dana yang disediakan oleh APBN dipastikan tidak mampu menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Dengan menggandeng pihak swasta, kebutuhan dana ini diharapkan dapat tercukupi. Pihak swasta yang tertarik ambil bagian dalam program KPS tak perlu khawatir atas risiko yang mungkin terjadi. Melalui PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), Pemerintah akan menjamin keberlangsungan proyek yang dijalankan atas tiga risiko penting investasi di sektor infrastruktur.

Pemerintah memberikan jaminan bahwa proyek KPS prioritas yang dibangun oleh pihak swasta akan dijamin cukup untuk mengembalikan nilai investasinya yang disebut juga sebagai resiko pengembalian atas investasi. Pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap risiko politik, apabila selama

masa konsesi Pemerintah melakukan perubahan peraturan yang mengakibatkan proyek dipandang tidak akan mampu mengembalikan investasi sesuai dengan yang diperjanjikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada penyelenggara proyek.

pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan (rasyid,1996:O) bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri apalagi dilayani, tetapi dibentuk untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemampuan bersama,dengan demikian pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

3.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013

Pembentukan PT SMI sebagai *infrastructure fund* menjadi salah satu langkah serius Pemerintah merangkul swasta. Selain memberikan dukungan institusi, yaitu melalui perusahaan pembiayaan dan perusahaan penjaminan infrastruktur, Pemerintah juga membuat kerangka kerja, kebijakan, serta regulasi yang mendukung percepatan pembangunan sarana infrastruktur. PT SMI merupakan salah satu bentuk dukungan institusi Pemerintah untuk

mengurangi adanya ketidaksesuaian pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Melalui PT SMI, mekanisme pembiayaan *long term financing* yang dapat dikatakan identik dengan pola pembiayaan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dicapai. Ini menjadi penting mengingat perbankan pada umumnya hanya

menyediakan produk atau instrumen investasi dengan tenor jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, PT SMI antara lain memiliki visi untuk memberikan dan Menyadari adanya keterbatasan *budget* untuk membiayai pembangunan infrastruktur maka dianggap perlu untuk membuat *vehicle* untuk menarik minat investor swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam menghimpun dana pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, PT SMI menggandeng sejumlah institusi multilateral untuk mendirikan anak perusahaan. Saat ini anak perusahaan yang sudah beroperasi bernama PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF) agar pola pembiayaan *long term financing* dapat terpenuhi. PT IIF saat ini memiliki modal sebesar Rp1,6 triliun serta dukungan *loan* Rp2 triliun dari *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) dengan tenor 25 tahun. Jangka waktu tersebut tidak bisa ditutup oleh instrumen investasi perbankan yang tenornya rata-rata hanya selama 5 hingga 7 tahun. Diharapkan dengan terbentuknya PT SMI bisa lebih fleksibel dalam bekerjasama dengan investor Selama tiga tahun berdirinya PT SMI, animo investor lokal maupun asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sebenarnya sangat besar. Yang menjadi *handicap* terbesar adalah kesiapan dari proyeknya itu sendiri. Terlebih jika dihadapkan dengan konsep *Public Private Partnership* (PPP) atau Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). PPP merupakan proyek Pemerintah sehingga membutuhkan *government support*. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Dengan adanya

local otonomy (otonomi daerah) maka kekuasaan Pemerintah Pusat semakin tersebar. Ada pro dan kontra terkait kebijakan otonomi di mana kebijakan pusat tidak bisa serta merta di-*replicate* dengan kebijakan *local government*. Contohnya adalah *water industry* di mana tarifnya diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat tidak bisa mengintervensi. Kesiapan proyek bergantung pada masing-masing PPP *project owner*, dalam hal ini biasa disebut *Government Contracting Agency* (GCA). Sehingga bila proyek siap Menyadari adanya keterbatasan *budget* untuk membiayai pembangunan infrastruktur maka dianggap perlu untuk membuat *vehicle* untuk menarik minat investor swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam menghimpun dana pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, PT SMI menggandeng sejumlah institusi multilateral untuk mendirikan anak perusahaan. Saat ini anak perusahaan yang sudah beroperasi bernama PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF) agar pola pembiayaan *long term financing* dapat terpenuhi. PT IIF saat ini memiliki modal sebesar Rp1,6 triliun serta dukungan *loan* Rp2 triliun dari *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) dengan tenor 25 tahun. Jangka waktu tersebut tidak bisa ditutup oleh instrument investasi perbankan yang tenornya rata-rata hanya selama 5 hingga 7 tahun. Diharapkan dengan terbentuknya PT SMI bisa lebih fleksibel dalam bekerjasama dengan investor. Selama tiga tahun berdirinya PT SMI, animo investor lokal maupun asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sebenarnya sangat besar.

Yang menjadi *handicap* terbesar adalah kesiapan dari proyeknya itu sendiri. Terlebih jika dihadapkan dengan konsep *Public Private Partnership*

(PPP) atau Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). PPP merupakan proyek Pemerintah sehingga membutuhkan *government support*. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah.

3.3. Kontrak Pelayanan Antara Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong

Sektor publik melakukan kontrak dengan swasta sebagai penyedia tunggal untuk melakukan desain dan konstruksi. Dengan cara ini, Pemerintah mendapatkan keuntungan dari *economies of scale* dan mengalihkan resiko yang terkait dengan desain kepada sektor swasta. Sektor publik melakukan kontrak dengan penyedia swasta untuk merancang, membangun dan mengoperasikan aset modal.

Sektor Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembiayaan KPS Infrastruktur dan Kesesuaiannya pada KPS Sosial 3 publikimplementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik abad 21 publik tetap bertanggung jawab untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan dan mempertahankan kepemilikan fasilitas. Sektor publik melakukan kontrak dengan penyedia swasta untuk merancang, membangun, membiayai dan mengoperasikan (DBFO) aset modal. Model ini biasanya melibatkan perjanjian konsesi jangka panjang. Sektor publik memiliki pilihan untuk mempertahankan kepemilikan aset atau sewa aset ke sektor swasta untuk periode waktu. Jenis pengaturan ini umumnya dikenal sebagai inisiatif keuangan swasta (PFI). Sebuah penyedia swasta bertanggung jawab untuk semua aspek proyek. Kepemilikan fasilitas baru ditransfer ke penyedia swasta, baik tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu yang tetap. Kesepakatan jenis ini juga

termasuk dalam domain dari sebuah inisiatif keuangan swasta. Susunan ini juga dikenal sebagai "membangun, mengoperasikan, memiliki, Transfer" atau BOOT.

3.4 Manfaat Kontrak Pelayanan Antara Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelayanan Publik

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005). Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini.

Dalam usaha menggabungkan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Pada artikel ini

kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Sektor publik adalah bidang kajian yang berkaitan dengan publik/masyarakat. Kajian sektor publik bisa diidentifikasi terdapat tiga elemen didalamnya yaitu government, civil society, dan privat sector. Mardiasmo mendefinisikan sektor publik sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2004:2). Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2004:1).

Organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak; (3) Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan; (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan; (6) Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Kolaborasi sektor publik dengan demikian dipahami sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari government, civil society, dan privat sector. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

IV. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitianh deskriptif kualitatif sebab dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkap fakta, fenomena ,keadan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan daengan “**Kontrak pelayanan antara sektor swasta dan pemerintah dari persaingan untuk kemitraan pada pemerintah daerah kabupaten sorong**”” sebab metode penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis metode penelitian yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi pada masyarakat ,pertentangan dua keadaan /lebih hubungan antara variabel ,perbedaan antar fakta ,pengaruh terhadap suatu kondisi ,dan lain.

V. Pembahasan

5.1 Profil Kabupaten Sorong

Struktur ekonomi menggambarkan kontribusi/sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi suatu sektor maka semakin besar pula peranannya di dalam perekonomian. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian merupakan sektor-sektor utama atau sektor-sektor dominan dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Semakin besar pertumbuhan yang terjadi pada sektor-sektor tertentu

maka semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat kontribusi sektor tersebut dapat diketahui sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat digunakan analisis *share*, yaitu dengan cara mengalikan distribusi persentase atas dasar harga konstan tahun sebelumnya (t_{n-1}) dengan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan masing-masing sektor ekonomi pada tahun yang bersangkutan.

Pada tahun 2011, terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian, Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong. Dari 6,50 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong, sebesar 3,06 persen berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,12 persen, sementara sektor industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,94 persen.

Sektor-sektor lainnya juga memberikan kontribusi pertumbuhan positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong. Sektor pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan 0,76 persen; sektor bangunan 0,35 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,12 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 0,12 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,03 persen. Sedangkan sektor listrik dan air bersih menjadi sektor penyumbang pertumbuhan terkecil yaitu 0,01 persentasi. Setelah subsektor pertambangan migas dan subsektor industri migas dieliminir, terlihat kondisi yang berbeda pada

sumbangan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan terhadap PDRB tanpa migas.

Pada tahun 2011 sektor pertambangan dan penggalian hanya memberikan sumbangan terhadap PDRB tanpa migas sebesar 1,31 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 16,68 persen. Sektor listrik dan air bersih tetap menjadi sektor dengan sumbangan terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sorong yaitu sebesar 0,32 persen.

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, tiga sektor utama yang mendominasi penciptaan PDRB tanpa migas di Kabupaten Sorong adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 75 persen terhadap PDRB tanpa migas Kabupaten Sorong akan tetapi sumbangan ketiga sektor ini mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu dari 81,08 persen pada tahun 2008 menjadi 78,31 persen pada tahun 2011.

Perekonomian Kabupaten Sorong selama tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif apabila dibandingkan dengan tahun 2010. Beberapa sektor terlihat mengalami percepatan pertumbuhan, namun beberapa lagi terlihat mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2011, nilai PDRB Kabupaten Sorong atas dasar harga berlaku yang tercipta mencapai 6,84 triliun rupiah dengan indeks perkembangan dari tahun 2008 sebesar 145,1. Hal ini berarti bahwa nilai PDRB tahun 2011 terjadinya kematian. Output Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar penentu strategi dan kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat

dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat maka perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka PDRB dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Perkiraan output atas dasar harga yang berlaku didasarkan pada perkalian antara jumlah penumpang dan barang yang diangkut dengan rata-rata tarif per unit muatan. Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dicari dengan menggunakan cara ekstrapolasi dengan indeks gabungan angkutan laut sebagai ekstrapolatornya.

VI. Penutup

6.1 Kesimpulan

Bagi mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat maka perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka PDRB dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Adanya hubungan antara manusia tersebut kemudian melahirkan istilah kemitraan. Dalam rancangan strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor swasta didalam mengimplementasikan kebijakan publik didalam berbagai bidang, dalam bidang ekonomi khususnya. Ada lima kerjasama antar pemerintah dengan swasta antara lain; kerjasama bagi hasil usaha, kerjasama antara produksi, kerjasama manajemen, kerjasama bagi tempat usaha, dan kerjasama bagi keuntungan.

Melalui pemahaman yang lebih tentang proses implementasi dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses implementasi yang lebih baik sehingga dimasa – masa mendatang implementasi suatu kebijakan akan lebih memiliki peluang untuk berhasil di daerah kabupaten sorong dibanding kan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwan agus purwanto,2012,Implementasi kebijakan publik ,Gava
Media,yogyakarta Download Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
Download .Kerjasama pemerintah swasta(kps).
- JhonW.Creswell,2010 Research design''Pendekatan kualitatif'' Musgrove, P.,
Public and Private Roles in Health: Theory and Financing Patterns,
Musgrove, P., *Public and Private Roles in Health: Theory and Financing*
Patterns.
- Waluyo,2007 Manajement Publik''Pengelolaan keuangan daewrah di Era otonomi
daerah.
- .